

KEBIJAKAN *STUDIEFONDS* MANGKUNEGARAN UNTUK ANAK ABDI DALEM PRAJA MANGKUNEGARAN TAHUN 1921-1941

Reihan Ayu Cahyaningrum

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email: reihanayu.21048@mhs.unesa.ac.id

Sumarno

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya
Email: sumarno@unesa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kebijakan *Studiefonds* Mangkunegaran pada tahun 1921–1941 sebagai upaya membuka akses pendidikan bagi anak-anak abdi dalem. Program ini dirancang sebagai pinjaman belajar yang dikelola secara sistematis oleh *Commissie van Advies* dengan prinsip meritokrasi dan tanggung jawab sosial. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan, struktur pengelolaan, dan dampak kebijakan terhadap mobilitas sosial abdi dalem. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan sejarah sosial, melalui studi arsip, dokumen resmi, dan laporan tahunan *Studiefonds*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil mendorong lahirnya generasi baru abdi dalem yang terdidik dan mampu mengisi posisi strategis dalam birokrasi praja. Program ini juga memperkuat citra Mangkunegaran sebagai institusi tradisional yang responsif terhadap perubahan zaman. Pendidikan melalui *Studiefonds* menjadi sarana transformasi sosial internal yang mempertemukan nilai-nilai budaya Jawa dengan tuntutan modernitas kolonial.

Kata Kunci: Abdi dalem, Mangkunegaran, pendidikan kolonial, *Studiefonds*, transformasi sosial.

ABSTRACT

This study examines the Studiefonds policy of Mangkunegaran from 1921 to 1941 as an effort to provide educational access for the children of abdi dalem (palace servants). The program was designed as an educational loan system, managed systematically by the Commissie van Advies, and based on meritocracy and social responsibility. The aim of this research is to explore the implementation, administrative structure, and social impact of the policy on the social mobility of abdi dalem. The method used is historical research with a social-historical approach, relying on archival documents, official reports, and annual records of the Studiefonds. The findings show that the policy succeeded in producing a new generation of educated abdi dalem who held strategic roles within the palace bureaucracy. This program also strengthened the image of Mangkunegaran as a traditional institution capable of adapting to the demands of modernization. Education through the Studiefonds served as a vehicle for internal social transformation, bridging Javanese cultural values with colonial modernity.

Keywords: Abdi dalem, colonial education, Mangkunegaran, *Studiefonds*, social transformation.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam mendorong perubahan sosial dan membentuk identitas kolektif suatu masyarakat. Pada awal abad ke-20, di tengah arus kolonialisme yang masih mengakar di Hindia Belanda, muncul kesadaran baru di kalangan elite bumiputera mengenai urgensi pendidikan sebagai alat mobilitas vertikal. Di tengah keterbatasan akses pendidikan akibat kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial, tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Dr.

Wahidin Soedirohoesodo tampil sebagai pelopor gagasan dana pendidikan atau *Studiefonds* bagi pelajar pribumi. Bagi Wahidin, pendidikan bukan hanya soal mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan juga jalan untuk membangkitkan martabat yang telah lama terpuruk dalam penjajahan.¹ Ia menempuh propaganda keliling Jawa pada 1906–1907 untuk menggalang dana dan kesadaran kalangan priyayi atas pentingnya mendukung pendidikan anak-anak bumiputra.²

¹ Robert Van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 74–75.

² D. Brakel, *Vraagbaak Voor Ouders (Voogden) in Nederlandsch Indië* (Bandoeng: N.V. Mij.

Gagasan *Studiefonds* ini lalu menginspirasi banyak institusi tradisional, termasuk keraton. Salah satunya yang menonjol adalah Praja Mangkunegaran di Surakarta. Di bawah pemerintahan Mangkunegara VII (1916–1944), pendidikan tidak hanya dipandang sebagai alat modernisasi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat stabilitas internal praja. Melanjutkan fondasi kebijakan dari Mangkunegara VI, Mangkunegara VII memperluas dan mengefektifkan pelaksanaan *Studiefonds Mangkunegaran*, yakni dana belajar yang ditujukan khususnya bagi anak-anak *abdi dalem*, *sentana*, dan masyarakat umum yang memiliki prestasi akademik namun terkendala ekonomi.³ Kebijakan ini secara resmi diatur melalui *Rijksblad Mangkunegaran No. 20 Tahun 1917* dan dijalankan melalui badan khusus bernama *Commissie van Advies*.⁴

Berbeda dari beasiswa yang diberikan tanpa kewajiban pengembalian, *Studiefonds* Mangkunegaran dirancang sebagai sistem pinjaman lunak. Setelah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh pekerjaan tetap dengan penghasilan minimum 50 gulden per bulan, penerima diwajibkan mengembalikan dana tersebut secara bertahap ke kas praja.⁵ Model ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga memuat aspek akuntabilitas dan pembentukan karakter yang bertanggung jawab secara moral dan finansial. Pengelolaan dana belajar ini dilaksanakan secara birokratis dan terdokumentasi dengan baik, seperti terlihat dalam *Eerste Verslag van het Mangkoenegaransche Studiefonds* tahun 1923.⁶

Penerapan kebijakan ini membawa implikasi sosial yang luas di lingkungan Praja Mangkunegaran. *Abdi dalem*, yang secara struktural menempati posisi subordinat dalam sistem feodal Jawa, diberikan peluang untuk mentransformasi peran mereka melalui jalur pendidikan. Pendidikan menjadi jembatan yang menghubungkan antara kesetiaan terhadap keraton dan potensi pembaharuan sosial. Mereka tidak lagi sekadar menjadi pelayan simbolik upacara dan administrasi keraton, tetapi bertransformasi menjadi birokrat, guru, dan pemimpin komunitas yang memiliki bekal pendidikan formal.⁷ Dalam konteks ini, pendidikan yang disediakan melalui *Studiefonds* menjadi bentuk baru dari *ngayomi* atau perlindungan yang diberikan raja kepada kawulanya.

Kebijakan *Studiefonds* ini juga mencerminkan proses hibridisasi antara nilai-nilai feodal dengan semangat modernitas yang diperkenalkan kolonialisme. Di satu sisi, keraton tetap mempertahankan patronase tradisional, di mana raja memberikan "anugerah" kepada rakyatnya; namun di sisi lain, pengelolaan

pendidikan dilakukan dengan prinsip efisiensi dan rasionalitas modern.⁸ Oleh karena itu, keberadaan *Studiefonds* tidak hanya memperkuat kohesi sosial internal praja, tetapi juga memperlihatkan kemampuan adaptif institusi tradisional dalam menjawab tantangan zaman.

Pada tingkat makro, kebijakan ini menunjukkan bahwa reformasi pendidikan tidak selalu bersumber dari intervensi pemerintah kolonial, tetapi juga dapat berasal dari inisiatif lokal yang berakar pada struktur sosial dan budaya Jawa. Mangkunegaran menjadi contoh bagaimana kekuasaan tradisional mampu menjadi agen perubahan melalui jalur pendidikan. Kesadaran ini relevan untuk meninjau kembali narasi sejarah pendidikan Indonesia yang sering kali menempatkan keraton hanya sebagai entitas konservatif atau pasif dalam arus modernisasi. Padahal, seperti terlihat dalam kasus Mangkunegaran, keraton dapat memainkan peran aktif dalam membentuk struktur sosial baru yang lebih dinamis dan egaliter.

Penelitian ini akan menyoroti kebijakan *Studiefonds* Mangkunegaran selama periode 1921–1941, dengan fokus pada implementasi teknis, struktur pelaksanaan, serta dampaknya terhadap pendidikan dan mobilitas sosial anak-anak *abdi dalem*. Melalui pendekatan sejarah sosial, tulisan ini bertujuan memperkaya khazanah historiografi pendidikan Indonesia, khususnya dengan mengangkat dinamika pendidikan dari dalam kerangka kekuasaan tradisional Jawa yang sering kali terlupakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (*historical method*) yang bertujuan merekonstruksi fakta-fakta masa lalu secara kritis dan sistematis untuk memahami konteks kebijakan *Studiefonds* Mangkunegaran dalam kaitannya dengan pendidikan dan mobilitas sosial anak *Abdi Dalem*. Sebagai pendekatan ilmiah, metode sejarah tidak hanya bertumpu pada kronologi, tetapi juga interpretasi terhadap hubungan kausal antara struktur kekuasaan, nilai budaya, dan kebijakan sosial yang berlaku pada masa itu. Secara operasional, metode ini meliputi empat tahap utama, yaitu: heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

a. Heuristik

Tahap ini mencakup kegiatan pelacakan dan pengumpulan data dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Sumber primer utama dalam penelitian ini meliputi dokumen arsip resmi seperti *Rijksblad Mangkunegaran No. 20 Tahun 1917*, *Eerste*

Vorkink, 1914), hlm. 427.

³ "Het Studiefonds van het Mangkoenagorische Rijk," Djawa, Tahun IV (1924), hlm. 66.

⁴ *Rijksblad Mangkunegaran No. 20 Tahun 1917*.

⁵ Ibid.

⁶ Arsip Mangkunegaran, *Eerste Verslag van*

het Mangkoenegaransche Studiefonds, Kode A 644, 1923.

⁷ Peter Carey, *The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785–1855* (Leiden: KITLV Press, 2007), hlm. 156.

⁸ Wasino, *Modernisasi di Jantung Budaya Jawa: Mangkunegaran 1896–1944* (Jakarta: Kompas, 2014), hlm. 63–64.

Verslag van het Mangkoenagaransche Studiefonds tahun 1923 (Kode Arsip: A 644), dan laporan tahunan *Studiefonds* dari Reksa Pustaka Mangkunegaran Surakarta. Selain itu, digunakan pula bahan terbitan seperti artikel “Het Studiefonds van het Mangkoenagorische Rijk” dalam majalah *Djawa* tahun 1924. Sumber sekunder berupa buku sejarah modern digunakan untuk memberikan konteks dan penjelasan teoritis, seperti karya Robert Van Niel, Peter Carey, dan Wasino.

b. Kritik Sumber

Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap keaslian (kritik eksternal) dan kredibilitas isi (kritik internal) dari setiap dokumen yang ditemukan. Kritik sumber dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa setiap data yang digunakan memiliki validitas sejarah dan tidak mengandung bias yang dapat mengaburkan fakta. Misalnya, dokumen arsip dari Mangkunegaran dibandingkan dengan narasi yang tertera dalam koran-koran Belanda dan terbitan resmi kolonial seperti *Koloniale Verslagen van Nederlandsch-Indië*.

c. Interpretasi

Tahap interpretasi dilakukan untuk memahami makna dari data yang telah diverifikasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menempatkannya dalam kerangka sejarah sosial dan budaya Jawa awal abad ke-20. Fokus utama interpretasi diarahkan pada dinamika hubungan antara kebijakan *Studiefonds*, struktur sosial keraton, dan upaya modernisasi pendidikan. Proses ini menekankan pemahaman sebab-akibat, serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi posisi sosial anak Abdi Dalem dalam birokrasi praja dan masyarakat luas.

d. Historiografi

Langkah terakhir adalah menyusun hasil penelitian dalam bentuk penulisan ilmiah yang terstruktur dan argumentatif. Penyajian data tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, dengan menghubungkan temuan historis dengan konsep-konsep penting dalam studi sejarah pendidikan, patronase tradisional, dan perubahan sosial kolonial. Penulisan historiografi disusun dengan pendekatan tematik, yakni dengan memfokuskan pembahasan pada kebijakan, implementasi, dan dampak dari *Studiefonds* Mangkunegaran pada kurun waktu 1921–1941.

Pemilihan pendekatan sejarah ini didasarkan pada keyakinan bahwa perubahan sosial dalam sistem keraton seperti Mangkunegaran hanya dapat dipahami

secara utuh melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber historis yang memuat kebijakan internal dan dinamika kulturalnya. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penulis merekonstruksi kebijakan *Studiefonds* tidak hanya sebagai kebijakan pendidikan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi politik dan transformasi sosial internal keraton.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Studiefonds Mangkunegaran

Pada awal abad ke-20, Praja Mangkunegaran menunjukkan perhatian besar terhadap pendidikan sebagai alat transformasi sosial dan penguatan struktur internal. Kebijakan pendidikan tidak hanya diarahkan kepada golongan priyayi atau sentana, melainkan juga mencakup kelompok abdi dalem yang selama ini kurang diperhatikan dalam sistem pendidikan formal. Gagasan utama yang dikembangkan adalah pendirian lembaga *Studiefonds*, yakni dana belajar yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak-anak dari kalangan praja yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki prestasi akademik yang menjanjikan. Program ini merupakan respons terhadap situasi pendidikan pada masa kolonial yang sangat diskriminatif terhadap bumiputra dan tidak mengakomodasi aspirasi sosial kelompok bawah.⁹

Cikal bakal *Studiefonds* telah dirintis pada masa pemerintahan Mangkunegara VI, yang dikenal progresif dalam hal manajemen praja dan reformasi sosial. Dalam kerja sama dengan Residen Surakarta saat itu, G.F. van Wijk, Mangkunegara VI merancang sistem bantuan belajar untuk anak-anak pegawai praja, termasuk abdi dalem. Kebijakan ini menjadi semakin sistematis pada masa pemerintahan Mangkunegara VII, ketika *Studiefonds* diresmikan melalui *Rijksblad Mangkunegaran* No. 20 Tahun 1917.¹⁰ Dalam beleid tersebut, keraton mengatur mekanisme beasiswa melalui pembentukan panitia khusus bernama *Commissie van Advies*, yang bertugas menyeleksi, mengelola, dan mengawasi jalannya program beasiswa.

Struktur kelembagaan *Studiefonds* menunjukkan adanya tata kelola yang modern dan akuntabel. *Commissie van Advies* menyusun laporan tahunan, mengevaluasi siswa, serta bertanggung jawab kepada patih atau langsung kepada Mangkunegara. Setiap calon penerima beasiswa diwajibkan mengajukan surat permohonan dan rekomendasi dari kepala bagian, kemudian

2014), hlm. 33–35.

¹⁰ *Rijksblad Mangkunegaran* No. 20 Tahun 1917.

⁹ Wasino, *Modernisasi di Jantung Budaya Jawa: Mangkunegaran 1896–1944* (Jakarta: Kompas,

diverifikasi oleh panitia.¹¹ Calon penerima diutamakan berasal dari keluarga *abdi dalem*, *sentana*, atau pegawai praja dengan penghasilan rendah, dan telah menunjukkan kecakapan belajar di tingkat pendidikan dasar seperti Sekolah Rakyat atau HIS. Dengan demikian, keraton menerapkan sistem meritokrasi dalam lembaga yang secara struktur masih menganut prinsip feodal.

Jenis-jenis bantuan beasiswa pun diklasifikasikan secara terstruktur. Berdasarkan sumber arsip, *Studiefonds* terdiri dari tiga kategori: pertama, *Studiefonds A* untuk siswa umum; kedua, *Studiefonds B* untuk anak *abdi dalem*, *sentana*, dan *opsir legiun*; ketiga, *Kas Dalem*, yaitu dana khusus dari pribadi Mangkunegara untuk kasus darurat atau siswa yang dinilai sangat berbakat.¹² Sistem ini membuktikan bahwa kebijakan pendidikan yang dijalankan keraton tidak bersifat diskriminatif terhadap status sosial internal, bahkan memberi perlindungan dan perhatian terhadap kelas bawah di dalam lingkungan praja.

Besaran bantuan yang diberikan bervariasi sesuai jenjang dan lokasi pendidikan. Siswa yang bersekolah di Surakarta mendapatkan bantuan dalam bentuk uang sekolah dan biaya perlengkapan, sedangkan siswa di luar kota seperti di Semarang atau Yogyakarta menerima tunjangan tambahan untuk transportasi dan tempat tinggal.¹³ Pencatatan dana dilakukan secara rinci dan disampaikan dalam *Eerste Verslag van het Mangkoenegaransche Studiefonds* tahun 1923, menunjukkan bahwa keraton memiliki sistem dokumentasi pendidikan yang sangat rapi dan sesuai dengan standar kolonial.¹⁴

Penting dicatat bahwa dana belajar ini tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan bersifat pinjaman lunak. Para penerima beasiswa diwajibkan mengembalikan dana setelah lulus dan bekerja, dengan syarat penghasilan tetap minimal 50 gulden per bulan. Pembayaran dilakukan melalui cicilan bulanan sebesar 20% dari pendapatan, yang dapat disesuaikan tergantung kondisi penerima.¹⁵ Dalam beberapa kasus, cicilan dipotong

langsung dari gaji bagi penerima yang bekerja di praja, atau dikirim melalui wesel pos untuk yang bekerja di luar. Sistem ini menunjukkan bahwa *Studiefonds* tidak hanya mendidik secara akademik, tetapi juga membentuk karakter bertanggung jawab secara finansial dan sosial.

Kebijakan ini terus berjalan hingga akhir dekade 1930-an. Namun, menjelang pendudukan Jepang tahun 1942, kegiatan *Studiefonds* mulai terhenti karena kondisi politik dan ekonomi yang tidak memungkinkan.¹⁶ Kendati demikian, jejak program ini masih terlihat dari keberhasilan para alumninya dalam mengisi posisi penting di birokrasi keraton maupun pemerintahan kolonial. Dengan demikian, *Studiefonds* Mangkunegaran bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun loyalitas, integritas sosial, dan modernisasi dari dalam institusi tradisional.

B. Pendidikan Abdi Dalem Mangkunegaran

Pendidikan formal bagi kalangan *abdi dalem* di Mangkunegaran sebelum diterapkannya kebijakan *Studiefonds* sangatlah terbatas. Sebagian besar anak-anak *abdi dalem* tidak memiliki akses ke sekolah-sekolah rakyat maupun HIS, baik karena faktor ekonomi maupun karena status sosial mereka yang dianggap subordinat dalam struktur feodal keraton.¹⁷ Pendidikan yang mereka peroleh umumnya bersifat informal dan diwariskan secara turun-temurun, berupa pelatihan etiket, spiritualitas kejawaan, kemampuan membaca huruf Jawa, serta kedisiplinan sebagai pelayan keraton.¹⁸ Dalam lingkungan sosial saat itu, tidak banyak keluarga *abdi dalem* yang menganggap pendidikan modern sebagai kebutuhan primer bagi anak-anak mereka. Kondisi ini mulai berubah setelah pelaksanaan program *Studiefonds* pada awal 1920-an. Kesempatan yang diberikan oleh keraton melalui pinjaman belajar ini membuka ruang baru bagi anak-anak *abdi dalem* untuk mengenyam pendidikan formal, yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh kelompok priyayi atau pegawai tinggi praja.¹⁹

¹¹ Arsip Mangkunegaran. *Verslag van de Commissie Studiefonds*, Kode A 650, 1927.

¹² Arsip Mangkunegaran. *Het Studiefonds van het Mangkoenegaransche Vorstenland*, Kode A 645, 1924.

¹³ Arsip Mangkunegaran. *Data Keuangan dan Distribusi Studiefonds*, Kode A 661, 1935.

¹⁴ Arsip Mangkunegaran. *Eerste Verslag van het Mangkoenegaransche Studiefonds*, Kode A 644, 1923.

¹⁵ Arsip Mangkunegaran. *Surat Peraturan Pengembalian Studiefonds*, Kode A 653, 1933.

¹⁶ Arsip Mangkunegaran. *Laporan Tahunan Studiefonds*, Kode A 664, 1938.

¹⁷ Wasino, loc.cit. hlm. 38.

¹⁸ Koentjaraningrat. (1985). "*Kebudayaan Jawa*". Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 226–227.

¹⁹ Arsip Mangkunegaran. *Eerste Verslag van het Mangkoenegaransche Studiefonds*, Kode A 644, 1923.

Sekolah-sekolah yang dituju beragam, mulai dari Sekolah Rakyat, HIS (Hollandsch-Inlandsche School), MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), hingga AMS dan sekolah kejuruan. Akses ke lembaga pendidikan ini secara signifikan meningkatkan kualitas intelektual dan keterampilan anak-anak abdi dalem.²⁰

Perubahan ini tidak hanya berdampak pada individu penerima beasiswa, tetapi juga pada cara pandang keluarga abdi dalem terhadap pendidikan. Jika sebelumnya anak-anak dididik untuk mewarisi pekerjaan orang tuanya di keraton, kini muncul kesadaran bahwa pendidikan adalah jalan untuk keluar dari ketertinggalan sosial. Orang tua mulai mendorong anak-anak mereka mengikuti seleksi beasiswa, bahkan bersedia menjual barang berharga untuk menutupi kekurangan biaya pendidikan.²¹ Laporan tahunan Studiefonds tahun 1938 mencatat peningkatan pendaftar dari kalangan abdi dalem, dan jumlah siswa dari latar belakang ini yang lulus ujian akhir HIS dan MULO meningkat setiap tahun.²² Transformasi sosial ini terlihat pula dari pengalaman hidup para siswa penerima beasiswa. Banyak di antara mereka yang harus beradaptasi dengan lingkungan sekolah kolonial, di mana bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda, dan pola pendidikan sangat berbeda dari kehidupan keraton. Meski beberapa mengalami tekanan, sebagian besar siswa menunjukkan ketekunan dan daya adaptasi tinggi.²³ Mereka belajar membaca teks-teks Belanda, berhitung dengan metode modern, serta memahami ilmu alam dan sosial. Hasilnya, dalam waktu singkat, muncul generasi abdi dalem yang tidak hanya terdidik, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi dan organisasi yang lebih baik.

Gaya hidup siswa pun ikut berubah. Mereka mulai mengenakan pakaian modern seperti stelan jas dan celana panjang, membaca surat kabar, dan mengikuti perkembangan luar negeri.²⁴ Namun demikian, perubahan ini tidak berarti mereka tercerabut dari akar budaya keraton. Justru banyak dari mereka yang menjadi tokoh peralihan, yang mampu menjembatani nilai-nilai kejawaan dengan modernitas pendidikan kolonial. Dengan tetap mempertahankan kesopanan, sikap hormat,

dan loyalitas pada keraton, para alumni ini menjadi sosok ideal dalam konteks perubahan zaman. Setelah lulus, sebagian besar alumni Studiefonds dari kalangan abdi dalem dipekerjakan di lingkungan praja sebagai guru di sekolah bumiputra, juru tulis, pengarsip, dan staf birokrasi.²⁵ Mereka memperoleh gaji tetap, tunjangan, dan pengakuan sosial yang lebih tinggi. Bagi keluarga mereka, ini merupakan lompatan besar secara ekonomi maupun status sosial. Beberapa bahkan mampu menyekolahkan adik-adik mereka secara mandiri, tanpa perlu bantuan beasiswa. Dalam jangka panjang, ini menciptakan regenerasi sosial di kalangan abdi dalem.

Program *Studiefonds* juga menciptakan solidaritas sosial baru di kalangan alumni. Mereka saling membantu dalam mencari pekerjaan, bertukar informasi pendidikan, bahkan mendirikan kelompok belajar atau diskusi yang mendukung perkembangan intelektual internal keraton.²⁶ Dengan demikian, pendidikan yang diterima bukan hanya alat untuk mobilitas individu, melainkan juga pembentuk komunitas terpelajar baru di tubuh praja Mangkunegaran. Kesimpulannya, pelaksanaan *Studiefonds* telah membawa dampak transformasional dalam kehidupan abdi dalem Mangkunegaran pada periode 1921–1941. Dari semula sebagai kelompok marginal dalam sistem pendidikan kolonial, mereka bertransformasi menjadi bagian dari elite terdidik keraton yang berperan dalam memperkuat struktur birokrasi, membentuk budaya baru, dan mempertahankan identitas Jawa di tengah tekanan kolonialisme. Pendidikan menjadi gerbang perubahan status sosial dan kemandirian ekonomi yang melampaui batas-batas struktur tradisional yang sebelumnya membatasi mereka.

C. Dinamika dan Dampak Kebijakan Studiefonds Mangkunegaran

Pada masa pemerintahan Mangkunegara VII, pendidikan menjadi bagian penting dalam agenda modernisasi Praja Mangkunegaran. Kebijakan *Studiefonds* tidak hanya diposisikan sebagai alat peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk

²⁰ Arsip Mangkunegaran. *Data Penerima Beasiswa dan Lulusan HIS/MULO*, Kode A 648, 1926–1936.

²¹ Ibid.

²² Arsip Mangkunegaran. *Laporan Tahunan Studiefonds*, Kode A 664, 1938.

²³ Arsip Mangkunegaran. *Surat Korespondensi Commissie Studiefonds dan Kepala Sekolah HIS*, Kode

A 653, 1933.

²⁴ Arsip Mangkunegaran. *Catatan Harian Siswa Penerima Studiefonds*, Kode A 660, 1932–1936.

²⁵ Arsip Mangkunegaran. *Daftar Pengangkatan Pegawai dari Alumni Studiefonds*, Kode A 657, 1936.

²⁶ Arsip Mangkunegaran. *Notulen Perkumpulan Alumni Studiefonds*, Kode A 670, 1939.

membina loyalitas internal dan memperkuat kemandirian birokrasi keraton. Pelaksanaan beasiswa dimulai secara terstruktur sejak 1921 dengan membentuk lembaga pengelola, menyusun regulasi, dan menetapkan sistem pelaporan tahunan.²⁷ Program ini menjawab kebutuhan internal keraton untuk mencetak tenaga kerja terdidik dari kalangan abdi dalem tanpa sepenuhnya bergantung pada pegawai dari luar.²⁸ Dari segi pelaksanaan, *Studiefonds* dijalankan dengan prinsip adaptif dan penuh tanggung jawab sosial. Bagi siswa yang mengalami kesulitan ekonomi saat studi, keraton memberikan bantuan tambahan seperti tunjangan tempat tinggal dan konsumsi, terutama bagi mereka yang belajar di luar Surakarta.²⁹ Selain itu, siswa yang gagal menyelesaikan pendidikan karena alasan non-akademik tetap diberdayakan dalam lingkungan praja, umumnya di bidang administrasi, pengarsipan, atau pengelolaan surat-surat resmi.³⁰ Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam konteks Mangkunegaran tidak dipandang sekadar sebagai capaian akademik, melainkan juga proses pembentukan karakter, loyalitas, dan pengabdian.

Tidak dapat dimungkiri, program ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengembalian dana beasiswa. Meskipun bersifat pinjaman lunak, tidak semua alumni segera memperoleh pekerjaan dengan gaji minimal f 50 per bulan, sebagaimana disyaratkan.³¹ Namun, keraton tidak memberlakukan sanksi represif. Sebaliknya, diberlakukan sistem pengembalian yang fleksibel, termasuk penjadwalan ulang cicilan dan pembebasan sebagian utang bagi penerima yang menunjukkan itikad baik.³² Surat-surat internal menunjukkan bahwa pendekatan kekeluargaan masih menjadi prinsip utama dalam birokrasi pendidikan keraton.³³ Program *Studiefonds* membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial anak-anak abdi dalem. Sebelum adanya beasiswa ini, pendidikan formal hanya dapat diakses oleh kalangan

priyayi atau pegawai tinggi. Namun, dengan adanya program ini, anak-anak dari kalangan abdi dalem mulai memperoleh pendidikan di HIS, MULU, dan sekolah kejuruan.³⁴ Mereka bertransformasi dari pelayan istana menjadi sosok terdidik yang mengisi posisi strategis di birokrasi praja, seperti guru, pengarsip, juru tulis, bahkan perwakilan keraton dalam urusan sosial.³⁵ Dalam laporan tahunan tahun 1924 dan 1927, disebutkan bahwa jumlah penerima dari kalangan abdi dalem meningkat secara signifikan setiap tahunnya.³⁶

Dampak psikologis dari pendidikan ini juga terlihat dalam rasa percaya diri yang meningkat dan perubahan gaya hidup para siswa. Mereka mulai mengenakan pakaian Eropa, menguasai bahasa Belanda, dan mengadopsi pola pikir yang lebih rasional.³⁷ Namun, mereka tidak kehilangan identitas budaya. Justru, para alumni *Studiefonds* dikenal sebagai “golongan terpelajar keraton” yang mampu menjembatani dunia modern kolonial dengan nilai-nilai lokal Jawa.³⁸ Perpaduan antara nilai Barat dan budaya Jawa menjadikan mereka sosok strategis dalam sistem sosial keraton. Di tingkat struktural, para alumni ini berperan aktif dalam regenerasi birokrasi keraton. Mereka mengisi jabatan teknis di bidang keuangan, pencatatan, pendidikan, serta surat-menyurat.³⁹ Sebelumnya, posisi-posisi ini hanya bisa diisi oleh orang luar atau keluarga priyayi. Kehadiran tenaga kerja dari kalangan abdi dalem memperkuat kemandirian Mangkunegaran dalam pengelolaan birokrasi. Bahkan, dalam catatan keuangan tahun 1935 disebutkan alokasi honorarium untuk guru yang merupakan lulusan *Studiefonds*.⁴⁰ Ini menunjukkan efek regeneratif yang berkelanjutan.

Program ini juga mengubah persepsi sosial terhadap abdi dalem. Mereka tidak lagi dipandang sebagai pelayan tak berpendidikan, melainkan sebagai bagian dari praja yang memiliki posisi tawar kuat secara intelektual

²⁷ Arsip Mangkunegaran. *Verslag van de Commissie Studiefonds*, Kode A 650, 1927.

²⁸ Wasino, loc.cit. hlm. 38.

²⁹ Arsip Mangkunegaran. *Surat Bantuan Tambahan Siswa Luar Kota*, Kode A 648, 1925.

³⁰ Arsip Mangkunegaran. *Daftar Pengangkatan Pegawai dari Alumni Studiefonds*, Kode A 657, 1936.

³¹ Arsip Mangkunegaran. *Surat Peraturan Pengembalian Studiefonds*, Kode A 653, 1933.

³² Ibid.

³³ Arsip Mangkunegaran. *Surat Internal Studiefonds dan Sekolah HIS*, Kode A 648, 1925.

³⁴ Arsip Mangkunegaran. *Het Studiefonds van het Mangkoenegaransche Vorstenland*, Kode A 645, 1924.

³⁵ Arsip Mangkunegaran. *Laporan Tahunan Studiefonds*, Kode A 664, 1938.

³⁶ Ibid.

³⁷ Arsip Mangkunegaran. *Catatan Harian Siswa Penerima Beasiswa*, Kode A 660, 1932–1936

³⁸ Koentjaraningrat, loc.cit. hlm. 230.

³⁹ Arsip Mangkunegaran. *Rekening van het Onderwijsbudget*, Kode A 667, 1933.

⁴⁰ Arsip Mangkunegaran. *Rekening van het Onderwijsbudget*, Kode A 667, 1933.

dan ekonomi.⁴¹ Dalam beberapa kasus, mereka menjadi inspirasi bagi komunitasnya dan mendorong peningkatan jumlah pendaftar di tahun-tahun berikutnya.⁴² Studi ini menunjukkan bahwa Studiefonds berhasil menciptakan mobilitas sosial vertikal yang sebelumnya nyaris mustahil dalam tatanan sosial Jawa tradisional. Terakhir, keberhasilan program ini diakui pula oleh pihak luar, termasuk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Beberapa alumni diterima bekerja di lembaga pemerintah atau sekolah kolonial, yang menjadi bukti bahwa pendidikan dari keraton mampu bersaing dengan sistem pendidikan resmi kolonial.⁴³ Ini memperkuat posisi Mangkunegaran sebagai institusi tradisional yang mampu beradaptasi dengan modernitas. Dengan kata lain, Studiefonds tidak hanya menjadi alat transformasi sosial internal, tetapi juga representasi kekuatan lembaga lokal dalam membangun masa depan rakyatnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan *Studiefonds* Mangkunegaran pada tahun 1921–1941 membuktikan bahwa lembaga tradisional seperti keraton mampu menjadi agen perubahan sosial melalui pendidikan. Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak abdi dalem, tetapi juga menciptakan sistem yang profesional dan berkelanjutan dengan prinsip meritokrasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Melalui skema pinjaman belajar yang dikelola oleh *Commissie van Advies*, keraton berhasil menjalankan program pendidikan secara sistematis dengan dokumentasi dan evaluasi berkala. Dampak dari kebijakan ini sangat luas: anak-anak abdi dalem yang semula terpinggirkan dalam sistem sosial feodal, berhasil memperoleh pendidikan formal dan kemudian menempati posisi penting dalam birokrasi, pendidikan, dan kehidupan sosial. Mereka mengalami mobilitas sosial vertikal dan menjadi bagian dari “elite transisi” yang menjembatani nilai-nilai kejawaan dan modernitas kolonial. Di sisi lain, keberhasilan program ini juga memperkuat posisi politik dan reputasi budaya Mangkunegaran sebagai institusi tradisional yang adaptif terhadap tantangan zaman. Pendidikan melalui *Studiefonds* menjadi bukti nyata bahwa modernisasi dapat lahir dari dalam tubuh kekuasaan lokal, bukan semata hasil intervensi eksternal kolonial atau nasionalis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip/Dokumen

Arsip Mangkunegaran. (1923). *Eerste verslag van het Mangkoenegaransche Studiefonds* (Kode A 644). Arsip Mangkunegaran.

- Arsip Mangkunegaran. (1924). *Het Studiefonds van het Mangkoenegaransche Vorstenland* (Kode A 645). Arsip Mangkunegaran.
- Arsip Mangkunegaran. (1925). *Surat bantuan tambahan siswa luar kota* (Kode A 648). Arsip Mangkunegaran.
- Arsip Mangkunegaran. (1925). *Surat internal Studiefonds dan Sekolah HIS* (Kode A 648). Arsip Mangkunegaran.
- Arsip Mangkunegaran. (1926–1936). *Data penerima beasiswa dan lulusan HIS/MULO* (Kode A 648). Arsip Mangkunegaran.
- Arsip Mangkunegaran. (1927). *Verslag van de Commissie Studiefonds* (Kode A 650). Arsip Mangkunegaran.
- Arsip Mangkunegaran. (1932–1936). *Catatan harian siswa penerima Studiefonds* (Kode A 660). Arsip Mangkunegaran.
- Arsip Mangkunegaran. (1933). *Rekening van het onderwijsbudget* (Kode A 667). Arsip Mangkunegaran.
- Arsip Mangkunegaran. (1933). *Surat korespondensi Commissie Studiefonds dan Kepala Sekolah HIS* (Kode A 653). Arsip Mangkunegaran.
- Arsip Mangkunegaran. (1933). *Surat peraturan pengembalian Studiefonds* (Kode A 653). Arsip Mangkunegaran.
- Arsip Mangkunegaran. (1935). *Data keuangan dan distribusi Studiefonds* (Kode A 661). Arsip Mangkunegaran.
- Arsip Mangkunegaran. (1936). *Daftar pengangkatan pegawai dari alumni Studiefonds* (Kode A 657). Arsip Mangkunegaran.
- Arsip Mangkunegaran. (1936). *Testimoni Kepala Bagian Sekolah Praja* (Kode A 663). Arsip Mangkunegaran.
- Arsip Mangkunegaran. (1938). *Data pendaftaran Studiefonds* (Kode A 668). Arsip Mangkunegaran.
- Arsip Mangkunegaran. (1938). *Laporan tahunan Studiefonds* (Kode A 664). Arsip Mangkunegaran.
- Arsip Mangkunegaran. (1939). *Notulen perkumpulan alumni Studiefonds* (Kode A 670). Arsip Mangkunegaran.
- Rijksblad Mangkunegaran. (1917). *Rijksblad Mangkunegaran No. 20 Tahun 1917*.
- Van Niel, R. (1984). *Munculnya elite modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.

⁴¹ Arsip Mangkunegaran. *Testimoni Kepala Bagian Sekolah Praja*, Kode A 663, 1936.

⁴² Arsip Mangkunegaran. *Data Pendaftaran*

Studiefonds, Kode A 668, 1938.

⁴³ Peter Carey, *loc.cit.* hlm. 156.

B. Buku

- Brakel, D. (1914). *Vraagbaak voor ouders (voogden) in Nederlandsch Indië*. Bandoeng: N.V. Mij. Vorkink.
- Carey, P. (2007). *The power of prophecy: Prince Dipanagara and the end of an old order in Java, 1785–1855*. Leiden: KITLV Press.
- Djawa. (1924). Het Studiefonds van het Mangkoenagorische Rijk. *Djawa*, Koentjaraningrat.(1985). *Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka*.
- Wasino. (2014). *Modernisasi di jantung budaya Jawa: Mangkunegaran 1896–1944*. Jakarta: Kompas.



UNESA

Universitas Negeri Surabaya